

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal II Tentang “Jasa Akuntan Publik”

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengatur mengenai *audit tenure* dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal II tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002. Keputusan ini mengatur mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Keputusan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini memperbarui keputusan sebelumnya yaitu, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penelitian ini menggunakan dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal II tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik” karena *setting* penelitian ini adalah tahun 2010 - 2013.

2.1.2 Auditor Switching

Auditor switching merupakan perpindahan atau pergantian auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Bukti teoritis didasarkan pada teori agensi dan informasi ekonomi. Dalam kedua kasus, permintaan layanan audit muncul terutama dari adanya asimetri informasi. Dalam teori agensi, audit independen berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer). Tingkat biaya tersebut bervariasi pada organisasi, tergantung pada variabel seperti ukuran perusahaan, *gearing*, dan kepemilikan saham manajemen. Dalam informasi ekonomi, pemilihan auditor yang dapat dipercaya sebagai sinyal kejujuran manajemen (Dopuch dan Simunic, 1980; Dopuch dan Simunic, 1982 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Kadir (1994) mengemukakan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan berpindah KAP, yaitu perspektif auditor dan perspektif perusahaan. Mardiyah (2002) menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah faktor klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit.

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009).

Ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. Jadi, fokus perhatian peneliti adalah pada klien.

Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure*, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika kemudian auditor bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

2.1.2.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching*

Perusahaan dalam melakukan *auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

Ukuran KAP (Damayanti dan Sudarma, 2007), perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan itu (Halim, 1997). *Expertise* KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar (Mardiyah, 2002). Adanya faktor *expertise* itu akan menentukan perubahan auditor oleh perusahaan sehingga perusahaan lebih memilih KAP besar. Eichenseher dan Shields dalam Kartika (2006) mengemukakan fenomena bahwa persepsi *expensive*/mahalnya kantor akuntan akan menentukan kesuksesan klien. Telah diusulkan dalam literatur bahwa KAP yang lebih besar (*Big 4*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Nasser *et al.*, 2006). Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* mereka (Nasser *et al.*, 2006). Terlebih lagi, KAP yang lebih besar juga dianggap lebih independen daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil dalam menahan tekanan manajemen pada saat terjadi perselisihan ketika mereka biasanya memiliki lebih banyak klien

dan mampu untuk menyerahkan sebagian dari klien mereka yang lebih sulit (Chow dan Rice, 1982).

Ukuran klien, selain efek kemungkinan jenis KAP pada panjangnya *audit tenure*, pilihan perusahaan audit dapat dikaitkan dengan ukuran *auditee* dan jenis layanan yang diperlukan. *Auditee* yang lebih besar, karena kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan, sangat memerlukan KAP yang dapat mengurangi *agency cost* (Nasser *et al.*, 2006) dan ancaman kepentingan pribadi auditor (Hudaib dan Cooke, 2005). Selain itu, sebagai ukuran peningkatan perusahaan, kemungkinan bahwa jumlah konflik agensi juga meningkat dan ini mungkin akan meningkatkan permintaan untuk membedakan kualitas auditor (Nasser *et al.*, 2006). Berdasarkan argumen di atas, *audit tenure* pada klien besar lebih panjang daripada klien yang lebih kecil. Dengan kata lain, kecenderungan untuk beralih auditor lebih rendah untuk klien besar daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil.

Tingkat pertumbuhan klien, ketika bisnis terus tumbuh, permintaan terhadap KAP yang dapat mengurangi *agency cost* dan untuk menyediakan layanan non-audit diperlukan untuk perluasan peningkatan perusahaan. Oleh karena itu, bisnis berkembang diharapkan lebih cenderung mempertahankan KAP mereka daripada rekan-rekan mereka dengan pertumbuhan yang lebih rendah. Sinason *et al.* (2001) meneliti 16.976 perusahaan COMPUSTAT di US selama periode 20 tahun dan menemukan bahwa *audit tenure* secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan klien. Karena literatur menunjukkan bahwa *audit tenure* dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan klien, dihipotesiskan *audit*

tenure pada klien dengan pertumbuhan tinggi di Indonesia lebih panjang daripada klien dengan pertumbuhan rendah. Dengan kata lain, klien dengan pertumbuhan yang tinggi cenderung tidak beralih auditor.

Pergantian manajemen, dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditornya (Joher *et al.*, 2000 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007).

Fee audit, Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham, berhubungan dengan *total fees* yang mereka bayarkan. Dorongan untuk berpindah KAP dapat disebabkan oleh *fee* audit yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh suatu KAP pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan KAP tentang besarnya *fee* audit dan dapat mendorong perusahaan untuk berpindah kepada KAP yang lain (Schwartz dan Menon, 1985).

2.1.3 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.1.3.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)*

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagai: “*Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”.

Maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Menurut Kotler dan Nancy (2005) *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Menurut CSR Forum (Wibisono, 2007) *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

Ramon Mullerat menggambarkan CSR sebagai konsep bahwa perusahaan secara sukarela sebagai penghargaan kepada *stakeholders* yang lebih luas

memberikan kontribusi terhadap lingkungan hidup lebih bersih, kehidupan masyarakat lebih baik melalui interaksi aktif dengan semua pihak.

S. Zadek, M. Fostater dan P. Raynard membagi CSR ke dalam 3 (tiga) generasi yakni mulai dari yang sifatnya sekedar filantropis, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bersaing jangka panjang perusahaan, serta yang terakhir yang lebih maju lagi, yakni yang berorientasi pada advokasi dan kebijakan publik.

Tanggung jawab perusahaan yang baik atau CSR yang baik (*good CSR*) memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*, secara harmonis.

Chahal & Sharma (2006) dan Russo & Tencati (2009) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban perusahaan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sekaligus perusahaan, baik dalam masa sekarang maupun dimasa mendatang, melalui berbagai upaya bisnis maupun tindakan sosial, dan memberikan keyakinan bahwa hal tersebut akan menghasilkan keuntungan yang seimbang dan terus-menerus (*sustainable*) dalam jangka panjang bagi semua *stakeholders*.

2.1.3.2 Indikator *Corporate Social Responsibility (CSR)*

GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan berkelanjutan dan nerkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia.

Menurut GRI, ada tiga fokus pengungkapan CSR (2009), antara lain:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*), terdiri dari 9 item
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*), 30 item
3. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*) 40 item, terdiri dari:
 - a. Tenaga Kerja (*labor practices and decent work*)
 - b. Hak Asasi Manusia (*human rights performance*)
 - c. Sosial (*Society*)
 - d. Tanggung jawab Produk (*product responsibility performance*)

2.1.3.3 Keuntungan Melakukan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bagi Perusahaan

Dalam buku, “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR”, Yusuf Wibisono (2007) menguraikan 10 keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika melakukan program *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongkrak image dan reputasi positif perusahaan. Image / citra yang positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan.
2. Layak Mendapatkan sosial *licence to operate* masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki

perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

3. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan *stakeholders* akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders* perlu mendapat perhatian.
4. Melebarkan Akses Sumber Daya *Track records* yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan Akses Menuju Market Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
6. Mereduksi Biaya Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat

menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

7. Memperbaiki Hubungan dengan *Stakeholders* Implementasi *Corporate Social Responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*, dimana komunikasi ini akan semakin menambah *trust stakeholders* kepada perusahaan.
8. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator Perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Image perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.
10. Peluang Mendapatkan Penghargaan Banyaknya penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada pelaku *Corporate Social Responsibility* sekarang, akan menambah kas bagi perusahaan untuk mendapatkan *award*.

2.1.3.4 Manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bagi Masyarakat

Kegiatan CSR perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan
2. Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
4. Penyelesaian masalah lingkungan.
5. Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial.

2.1.4 *Auditor Opinion*

Laporan audit penting sekali dalam menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang telah dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Paragraf terakhir dalam laporan audit menyajikan kesimpulan auditor berdasarkan hasil dari proses audit yang telah dilakukan. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan laporan audit, sehingga sering kali seluruh laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor (opini audit).

Menurut Ardiyos (2007) opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan, Tobing (2004) menjelaskan bahwa opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh

auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Tujuan utama suatu audit adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan aturan yang berlaku dan semuanya itu tercermin dalam laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit yang baku. Laporan audit baku ada tiga paragraf, yaitu :

1. Paragraf Pendahuluan (*Introductory Paragraph*)

Tujuan utama paragraf ini adalah untuk membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Dalam paragraf ini terdapat tiga kalimat : kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit, sedangkan kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor.

2. Paragraf Ruang Lingkup (*Scope Paragraph*)

Berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut, serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk

memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Paragraf ruang lingkup juga menunjukkan beberapa keterbatasan audit.

3. Paragraf Pendapat (Opinion Paragraph)

Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2.1.4.1 Jenis – Jenis Auditor Opinion

Dalam paragraf pendapat, auditor akan menyatakan pendapat mengenai kewajaran sebuah laporan keuangan auditan. Menurut Mulyadi (2002:209) terdapat lima jenis pendapat auditor diantaranya :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi :

- a. Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.

- c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
- e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjabaran atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjabaran
(*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjabaran (atau bahasa penjabaran yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan audit. Paragraf penjabaran dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjabaran atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas
- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- d. Penekanan atas suatu hal
- e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan :

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah bahwa pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.1.4.2 Indikator *Auditor Opinion*

Purba (2009:83) menyatakan bahwa pemberian suatu opini audit untuk suatu perusahaan yang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya diragukan bukan keputusan yang mudah bagi auditor . Banyak indikator yang harus dipertimbangkan dalam pemberian opini audit karena keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh banyak kendala. Menurut Purba (2009: 35) kendala-kendala tersebut adalah kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial politik dan lain-lain. Sedangkan kendala internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lain-lain. Kendala

eksternal dan internal tersebut dapat dijadikan indikator dalam menentukan apakah asumsi masih berlaku atau tidak, atau dengan kata lain, apakah terdapat keraguan atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup.

2.1.5 *Financial Distress*

2.1.5.1 Pengertian *Financial Distress*

Menurut Ross dan Westerfield (1996 : 808) *financial distress* adalah suatu keadaan dimana *cash flow* operasi perusahaan tidak mampu menutupi atau mencukupi kewajiban saat ini, *financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan (*corporate failure*) pada kontraknya yang akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi *financial* antara perusahaan, kreditor dan investor.

Menurut Platt dan Platt (2002: 186) *Financial distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai dengan adanya faktor indikasi yaitu adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari Bank (Platt dan Platt, 2002). Kondisi *financial distress* tergambar dari ketidakmampuan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Terdapat perbedaan dalam mengartikan kesulitan keuangan pada penelitian penelitian terdahulu dan perbedaan ini tergantung pada cara mengukurnya (Wardhani, 2006).

Elloumi dan Gueyie (2001) mengategorikan perusahaan dengan *financial distress* bila selama dua tahun berturut-turut mengalami laba bersih negative (Kurniasari, 2009). Classens *et al.* (1999) dalam Wardhani (2006) mendefinisikan perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan sebagai perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu. Almilia dan Kristijadi (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang selama beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen.

Pada umumnya sinyal terjadinya *financial distress* terlihat dari pelanggaran perusahaan atau perjanjian utang dengan pihak kreditor serta pengurangan atau penghapusan dalam membayar dividen (Fitdini, 2009). Faktor utama untuk mengidentifikasi ini yaitu melalui kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang obligasi yang sedang beredar (Elloumi dan Gueyie, 2001).

Menurut Altman (1968), *financial distress* digolongkan ke dalam empat istilah umum, yaitu:

a. *Economic Failure*

Economic failure terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami hal tersebut dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditor berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (return) di bawah tingkat bunga pasar.

b. Business Failure

Business failure seringkali digunakan untuk menggambarkan berbagai macam kondisi bisnis yang tidak memuaskan. *Business Failure* mengacu pada sebuah perusahaan berhenti beroperasi karena ketidakmampuan untuk menghasilkan keuntungan atau mendatangkan penghasilan yang cukup untuk menutupi pengeluaran. Sebuah bisnis yang menguntungkan dapat gagal jika tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi pengeluaran.

c. Insolvency

1) *Technical Insolvency*

Merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sebagai akibat dari ketidakcukupan arus kas.

2) *Insolvency in Bankruptcy Sense*

Merupakan kondisi dimana total kewajiban lebih besar dari nilai pasar total asset perusahaan. Dan karena itu memiliki ekuitas yang negatif.

d. Legal Bankruptcy

Sebuah bentuk formal kebangkrutan dan telah disahkan secara hukum.

2.1.5.2 Manfaat Informasi Prediksi *Financial Distress*

Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan kinerja yang baik agar terhindar dari financial distress. Kinerja tersebut dapat dicerminkan dalam kemampuannya memprediksi adanya indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya prediksi tersebut dapat memberikan manfaat kepada perusahaan (Foster, 1986) yaitu:

1. Kreditor

Hubungan yang erat dengan lembaga baik mengambil keputusan apakah akan memberikan pinjaman dengan syarat – syarat tertentu atau merancang kebijaksanaan untuk memonitor pinjaman yang telah ada.

2. Investor

Distress prediction model dapat membantu investor dalam menentukan sikap terhadap surat – surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Investor dapat mengembangkan suatu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa model prediksi *financial distress* dapat menjadi peringatan awal adanya kesulitan keuangan pada suatu perusahaan.

3. Otoritas Pembuat Peraturan

Seperti halnya ikatan akuntan, badan pengawas pasar modal atau institusi lainnya, studi tentang financial distress sangat membantu untuk mengeluarkan peraturan – peraturan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat.

4. Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi tenaga kerja, industri, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam mengeluarkan peraturan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kemungkinan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik Negara.

5. Auditor

Satu penelitian yang harus dibuat oleh auditor adalah apakah perusahaan bisa *going concern* atau tidak. Dengan adanya model untuk memprediksi

kebangkrutan, maka auditor dapat melakukan audit dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan dengan lebih baik.

6. Manajemen

Financial distress akan menyebabkan adanya biaya baik langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung termasuk *fee* untuk akuntan dan pengacara. Sedangkan biaya tidak langsung adalah kehilangan penjualan atau keuntungan yang disebabkan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk menghindari biaya yang cukup besar tersebut, manajemen dengan indikator kesulitan keuangan dapat melakukan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Wijayanti (2010) melakukan penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, pergantian manajemen, opini audit, audit fee terhadap auditor switching. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Ukuran KAP dan fee audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, pergantian manajemen, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Hasil studi Prahartari (2013) yang meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi auditor switching di Indonesia dengan studi empiris pada

perusahaan property and real estate di BEI periode 2006-2012, dengan penelitian menggunakan analisis regresi logistik, menunjukkan bahwa penelitian tersebut mendapatkan hasil yaitu pergantian manajemen, opini audit dan *fee* audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian Nasser et al. (2006) menelaah perilaku auditor switching dalam lingkungan audit Malaysia untuk periode 1990 - 2000. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi logistik. Penelitian tersebut memberikan bukti tentang hubungan antara switching dan dua variabel, yaitu ukuran klien dan financial distress. Hasilnya yaitu ukuran klien, financial distress berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Agus Setiawan dan Lely Aryani M (2014) mendapatkan hasil dari penelitiannya yaitu bahwa CSR, *auditor opinion*, *financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate and property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. *Accounting firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate and property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi logistik.

Penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) menunjukkan hasil penelitiannya dengan analisis regresi logistik bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh pada *auditor switching*. Sedangkan opini audit tahun sebelumnya dan

pergantian manajemen tidak berpengaruh pada *auditor switching* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011.

Sinarwati (2010) melakukan penelitian mengenai perpindahan Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan *financial distress*. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa hanya variabel pergantian manajemen dan *financial distress* yang mempengaruhi perusahaan berpindah Kantor Akuntan Publik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian	Alat Analisis
1.	Wijayanti (2010)	Independen: Ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, <i>financial distress</i> , pergantian manajemen, opini audit, audit fee. Dependen: Pergantian auditor	Ukuran KAP dan Fee audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, <i>financial distress</i> , pergantian manajemen, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.	Regresi Logistik
2.	Prahartari (2013)	Independen: Pergantian manajemen, opini audit, <i>fee</i> audit dan ukuran perusahaan	Pergantian manajemen, opini audit dan <i>fee</i> audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor</i>	Regresi Logistik

		klien. Dependen: <i>auditor switching</i>	<i>switching</i> , sedangkan ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	
3.	Nasser et al. (2006)	Independen: Ukuran KAP, ukuran klien, pertumbuhan perusahaan dan financial distress. Dependen: <i>Auditor switching</i>	Ukuran klien, financial distress berpengaruh Terhadap <i>auditor switching</i> . Ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> .	Regresi Logistik
4.	Agus Setiawan dan Lely Aryani M (2014)	Independen: Corporate social responsibility (CSR), <i>auditor opinion</i> , <i>financial distress</i> dan <i>size</i> Dependen: <i>Auditor switching</i>	CSR, <i>auditor opinion</i> , <i>financial distress</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>auditor switching</i> , sedangkan <i>size</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .	Regresi Logistik
5.	Juliantari dan Rasmini (2013)	Independen: Ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, opini audit tahun sebelumnya, dan pergantian manajemen Dependen: <i>Auditor switching</i>	Ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh pada <i>auditor switching</i> Opini audit tahun sebelumnya dan pergantian manajemen tidak berpengaruh pada <i>auditor switching</i>	Regresi Logistik
6.	Sinarwati (2010)	Independen: Opini audit going concern, pergantian manajemen, reputasi auditor, kesulitan keuangan.	Pergantian manajemen dan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap	Regresi Logistik

		Dependen: Pergantian KAP	pergantian auditor. Opini audit going concern dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.	
--	--	------------------------------------	--	--

Tabel 2.1 menyajikan penelitian terdahulu mengenai pergantian auditor atau auditor switching.

2.3 Kerangka Pemikiran

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi, mempekerjakan dengan pegawai, keluarga, komunitas lokal, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup (KPMG, 2005). Tanggung jawab sebuah perusahaan tersebut meliputi beberapa aspek yang semuanya itu tidak dapat dipisahkan. Dari definisi tentang tanggung jawab perusahaan diatas munculah tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat menjadi CSR adalah kontribusi sebuah perusahaan yang terpusat pada aktivitas bisnis, investasi sosial dan program *philantrophy*, dan kewajiban dalam kebijakan publik (Wineberg 2004:72 dalam Tanudjaja 2006). Tujuan dari adanya CSR yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya. CSR bagian yang penting dalam strategi perusahaan dalam berbagai sektor dimana terjadi ketidakkonsistenan antara keuntungan perusahaan dan tujuan sosial, atau

perselisihan yang dapat terjadi karena isu-isu tentang kewajaran yang berlebihan (Heal, 2004).

Corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan, *image* perusahaan menjadi semakin baik. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam jangka panjang penjualan serta profitabilitas perusahaan akan meningkat (Retno dan Priantinah, 2012). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang menerapkan CSR cenderung untuk tidak melakukan *auditor switching* guna tetap menjaga citra perusahaan yang baik di mata para *stakeholder*.

Auditor opinion (opini audit) diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya (Rahman dan Siregar, 2012). Auditor independen harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup sebagai basis memadai dalam merumuskan pendapatnya (Henni Yuspita, 2013).

Opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Dalam perkembangannya, peran opini audit menjadi penting dalam

kaitannya dengan citra perusahaan dimata para pengguna laporan keuangan, diantaranya para pemegang saham, kreditor, investor, pemerintah dan masyarakat umum (Kemal Muhammad, 2012).

Ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor dan salah satu pihak dapat memisahkan diri, hal itu dapat memicu terjadinya pergantian auditor atau yang disebut dengan *auditor switching*. Selain itu, *auditee* tentunya menginginkan laporan keuangannya mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian dari KAP. Di sisi lain, akuntan publik harus berlaku profesional sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi, sehingga apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan standar dalam pengauditan dapat menimbulkan konflik.

Financial distress menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005) merupakan keadaan dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitor karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana dimana total kewajiban lebih besar daripada total aset, serta tidak dapat mencapai tujuan ekonomi perusahaan, yaitu profit.

Kondisi *financial distress* perusahaan didefinisikan sebagai kondisi di mana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan (*Insolvency*). *Insolvency* dapat dibedakan dalam 2 kategori, (Emery, Finnery, Stowe, 2004 dalam Suroso 2006), yaitu:

1. *Technical Insolvency*

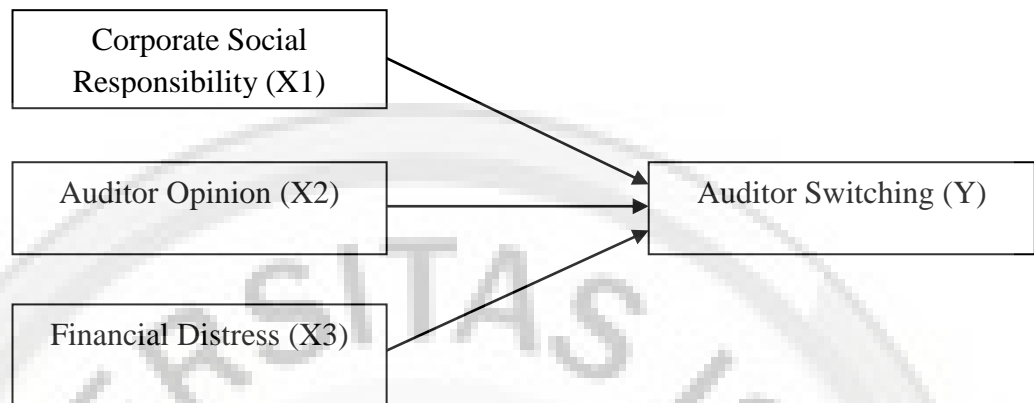
Bersifat sementara dan munculnya karena perusahaan kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek.

2. *Bankruptcy Insolvency*

Bersifat lebih serius dan munculnya ketika total nilai hutang melebihi nilai total aset perusahaan atau nilai ekuitas perusahaan negatif. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan menghadapi *financial distress* yaitu antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, ketinggalan teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, kelemahan manajemen perusahaan dan penurunan aktifitas perdagangan industri (Wruck, 1990 dalam Whitaker, 1999). Dalam kondisi ekonomi yang tidak buruk, kebanyakan perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah akibat dari kelemahan manajemen (Whitaker, 1999).

Financial distress merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Bagi perusahaan yang terancam bangkrut, posisi keuangan mungkin memiliki dampak penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh *corporate social responsibility* (X1), *auditor opinion* (X2) dan *financial distress* (X3) terhadap *auditor switching* (Y). Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap *Auditor Switching*

Menurut Retno dan Priantinah (2012), *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan, *image* perusahaan menjadi semakin baik. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin

tinggi sehingga dalam jangka panjang penjualan serta profitabilitas perusahaan akan meningkat.

Agus Setiawan dan Lely Aryani M (2014) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara CSR pada probabilitas perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif pada *auditor switching*.

2.4.2 Pengaruh *Auditor Opinion* Terhadap *Auditor Switching*

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penelitian Chow dan Rice, 1982; Crashwell, 1988; Hudaibe dan Cooke, 2005; dan Wijayanti, 2010 mengatakan bahwa opini adalah faktor yang berpengaruh terhadap pergantian auditor atau KAP. Penelitian yang dilakukan oleh Chow dan Rice (1982) dan Craswell (1988) berfokus pada pengaruh *qualified opinion* terhadap pergantian auditor atau KAP. Penelitian tersebut mengatakan jika laporan keuangan perusahaan mendapat *qualified opinion* akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan

kompensasi yang diterima oleh manajemen menurun. Damayanti dan Sudarma (2007) berpendapat manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya.

Menurut Kawijaya dan Juniarti (2002) bahwa opini selain wajar tanpa pengecualian memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien lebih menginginkan auditor memberi opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal karena bermanfaat untuk keputusan investasi. Chow dan Rice (1982) memperoleh bukti empiris bahwa perusahaan mengganti auditor atau KAP setelah menerima opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangannya.

H2: Opini audit berpengaruh positif pada *auditor switching*.

2.4.3 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching*

Financial distress adalah suatu dimana *cash flow* operasi perusahaan tidak mampu menutupi atau mencukupi kewajiban saat ini, *financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan (*corporate failure*) pada kontraknya yang akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi *financial* antara perusahaan, kreditor dan investor (Ross dan Westerfield, 1996 : 808).

Ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut. Kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang terancam bangkrut untuk berpindah auditor atau KAP (Schwartz dan Menon, 1985). Selain itu, Schwartz dan Soo (1995) dalam Damayanti dan Sudarma (2007)

menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut.

Posisi keuangan *auditee* mungkin memiliki implikasi penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* juga bisa disebabkan karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan.

Klien dengan tekanan finansial cenderung untuk menggantikan auditor atau KAP mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat (Schwartz dan Menon, 1985; Hudaib dan Cooke, 2005). Dengan demikian, auditor pada *distressed clients* memiliki *audit tenure* yang lebih pendek dibandingkan dengan rekan-rekan audit mereka pada klien yang lebih sehat dan pada gilirannya akan cenderung diganti.

H3: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.